

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang bisa bertumbuh cepat dan bisa mendukung perekonomian nasional salah satunya yaitu perbankan. Selaku instansi pelayanan keuangan, contoh tugas bank ialah mengalirkan dana pada warga yang memerlukan modal usaha melewati usaha kecil, usaha mikro, serta usaha menengah. Dengan dialirkannya dana pada zona riil di masyarakat, alhasil dengan cara tidak langsung bank berfungsi guna memajukan perekonomian untuk masyarakat.

Namun masyarakat di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan terkait produk dan jasa pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga finansial. Sehingga hal ini berdampak krisis golongan *in the bottom of pyramid* (pendapatan kecil, tanpa aturan menetap di pelosok, pekerja yang tidak mempunyai dokumen identitas sa, orang cacat, serta warga pinggir kota) yang biasanya *unbanked* yang tercantum sangat besar selain negara maju. Inklusi finansial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kurangi jumlah masyarakat *unbanked* ataupun yang belum mempunyai rekening bank sebab tidak mempunyai akses jasa perbankan dasar semacam tabungan.

Ketersediaan akses di bermacam instansi, produk, juga pelayanan jasa keuangan cocok dengan keperluan serta daya masyarakat pada rangka tingkatan kesejahteraan masyarakat ialah definisi inklusi keuangan (Keuangan, n.d.). Banyaknya masyarakat menjadi *unbanked* dikarenakan tidak mengetahui produk yang cocok serta sarana yang sesuai dengan budget yang dimiliki. Inklusi keuangan ialah bagian krusial dalam proses inklusi sosial ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menunjang aktivitas solusi kemiskinan, mengurangi perbedaan antar individu atau antar wilayah, serta membangun stabilitas sistem keuangan.

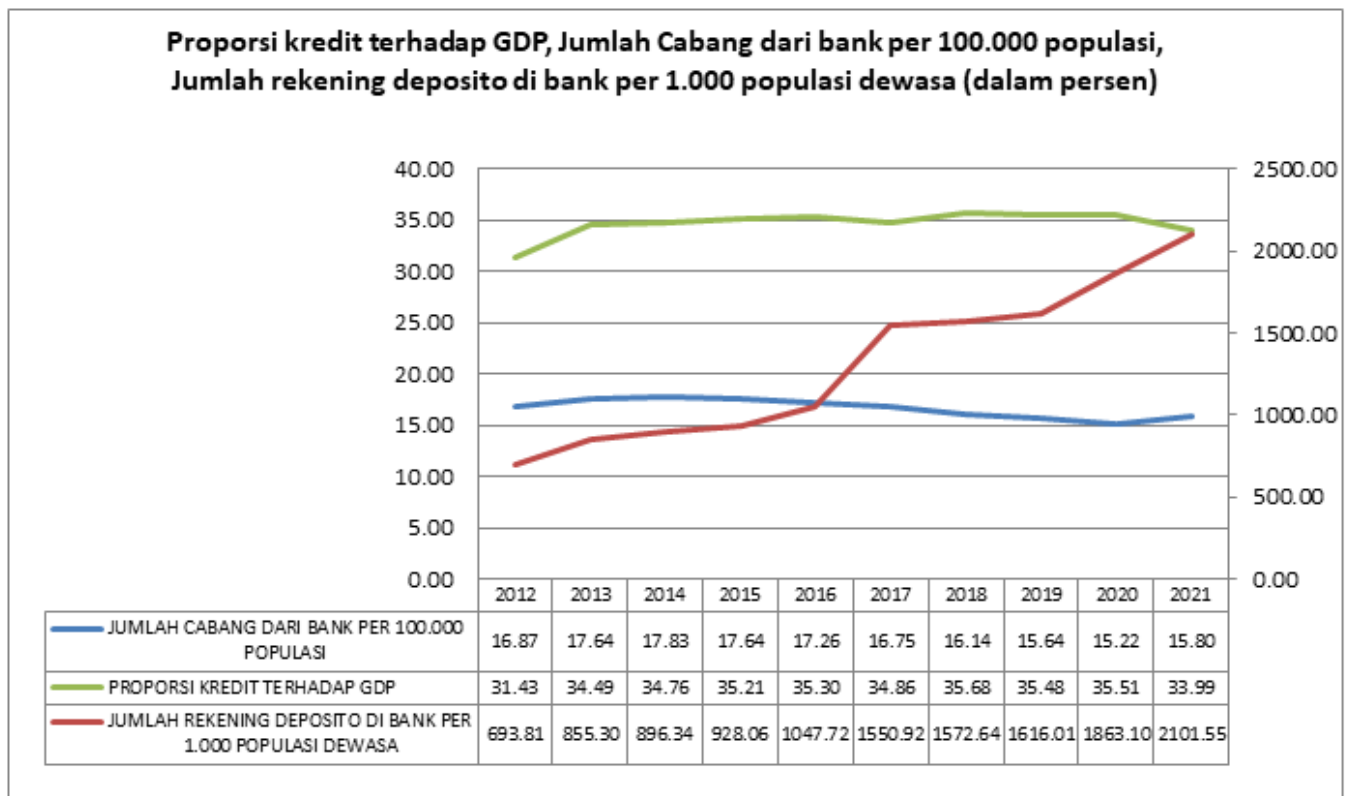
Economic Development dipengaruhi oleh inklusi keuangan yang merupakan aspek penting dari pengembangan keuangan. *Economic Development* bisa di nilai dari PBD suatu negara yang karena salah satu indikator makro yang bisa memberikan ilustrasi kondisi perekonomian masyarakat dalam sebuah negara tiap tahunnya. PBD meningkatkan permintaan finansial, sehingga dapat meningkatkan liberlisasi keuangan serta pembangunan keuangan. Taraf PBD suatu wilayah mencerminkan kekuatan yang komprehensif serta memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan inklusi keuangan.

Government Intervention mengacu kepada aksi yang dilakukan oleh pemerintah guna memengaruhi distribusi sumber daya serta mekanisme pasar. Intervensi pemerintah dibutuhkan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar dan mengembangkan perekonomian melalui penyesuaian dana cadangan, mengendalikan kebijakan moneter, suku bunga simpan pinjam, serta memperkuat pengawasan resiko keuangan.

Pada tahun 2020 *Internet Penetration Rate* di Indonesia berada di angka 54% dikarenakan tak semua masyarakat memiliki akses internet seperti di pedalaman yang belum terjangkau oleh signal. Dalam Era Industri 4.0 kala ini

masyarakat di haruskan untuk menelaah teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan jaman yang ada semua masyarakat dapat mempelajari serta menggunakan teknologi dengan tepat dan efisien. Perkembangan teknologi memudahkan dalam mendapatkan informasi serta turut membantu meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan.

Masyarakat menghasilkan Dana Pihak Ketiga, terbentuk dari tabungan, giro, serta deposito untuk mengukur keberhasilan bank dari kemampuan membiayai operasional dari sumber dana ini. Dikarenakan dana masyarakat merupakan sumber dana utama bank maka bank wajib mengalirkan kembali pada masyarakat dalam wujud kredit dan meningkatkan terpenuhinya kebutuhan atas produk serta jasa keuangan yang tepat lancar, dan aman dalam rangka tingkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1 Proporsi kredit terhadap GDP, Jumlah Cabang dari bank/100.000 populasi, Jumlah rekening deposito di bank/1.000 populasi dewasa (dalam persen)

Dari Gambar 1.1 menunjukkan jika puncak kenaikan jumlah cabang dari bank umum terjadi di tahun 2014 pembukaan cabang bank umum tidak terlalu meningkat cenderung menurun ditahun berikutnya hingga sekarang sudah dibawah 30.000 unit kondisi ini dikarenakan perbankan sekarang ini menuju pada arah digitalisasi jadi tidak dibutuhkan banyak cabang. Perihal tersebut dapat diamati dari transaksi yang dilaksanakan lewat *mobile apps* tiap bank bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu jasa digitalisasi yang dilakukan oleh

perbankan ialah pembukaan rekening online yang memudahkan nasabah dalam pembukaan rekening. Proporsi kredit mengalami peningkatan pada tahun 2012 – 2016 dan mengalami penurunan ditahun berikutnya hingga tahun 2021. Melihat proporsi kredit yang menurun dari tahun ke tahun terdapat kemungkinan bahwa perbankan belum mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dapat dicermati juga dari Gambar 1.1 jumlah rekening deposito bertumbuh di tiap tahunnya terutama pada tahun 2017 bertambah sebesar 48%. Keadaan ini mengindikasikan bahwa dibutuhkan evaluasi dana pihak ketiga yang terdapat pada perbankan terhadap inklusi keuangan. Selain Dana pihak ketiga penelitian ini pula menambahkan variabel ekonomi lain yaitu, Pertumbuhan ekonomi, Intervensi Pemerintah, dan IPR. Variabel ekonomi tersebut merupakan variabel yang dianggap penting dalam mempengaruhi Inklusi Keuangan.

Sesuai dengan paparan diatas, menjadikan “Pengaruh GDP, GOV, IPR, dan TRF terhadap *Financial Inclusion* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 - 2022” sebagai judul riset.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan riset ini yang dapat diambil dari penjelasan diatas yakni :

1. Apakah GDP punya pengaruh terhadap *Financial Inclusion*?
2. Apakah GOV punya pengaruh terhadap *Financial Inclusion*?
3. Apakah IPR punya pengaruh terhadap *Financial Inclusion*?
4. Apakah TPF punya pengaruh terhadap *Financial Inclusion*?
5. Apakah GDP, GOV, IPR, dan TPF secara bersamaan berpengaruh terhadap *Financial Inclusion*?

1.3 Tinjauan Pustaka

1.3.1 *Financial Inclusion* (FI)

Menurut (*World Bank*, 2022), Inklusi Keuangan ialah kemudahan akses buat setiap orang atau bisnis yang mampu memanfaatkan produk atau layanan keuangan.

Inklusi keuangan ialah akses yang tersedia untuk aneka macam produk, layanan, serta lembaga pelayanan keuangan yang dapat dipilih sesuai keperluan serta saya masyarakat untuk tingkatkan kesejahteraannya (*Otoritas Jasa Keuangan*, 2016).

Tabel 1.1 Indikator *Financial Inclusion*

No	Variabel	Indikator
1	Aksesibilitas	Jumlah rekening deposito di bank per 1.000 populasi
2	Availibilitas	Jumlah cabang dari bank per 100.000 populasi
3	Penggunaan Jasa Perbankan	Porpori kredit terhadap GDP

1.3.2 *Economic Development (GDP)*

PDB merupakan sebuah variabel yang mengukur total pendapatan, total produksi, dan total belanja sebuah negara sehingga menjadi indikator krusial dalam menentukan siklus bisnis. (Hakim, 2021)

Nilai pasar produk maupun layanan paling akhir yang dihasilkan sebuah negara di rentang waktu yang sudah ditentukan ialah definisi dari Produk Domestik Bruto. (Harmadi, 2020)

$$PDB = C + I + G + NX$$

1.3.3 *Government Intervention (GOV)*

Intervensi pemerintah adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam proses pasar guna membenahi kegagalan pasar serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. (Wikipedia, 2016)

Intervensi pemerintah dapat dikatakan sebagai campur tangan yang dilakukan pemerintah berupa sistem, dan kebijakan mengurus negaranya dalam memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara. (Jumiarti, 2018)

1.3.4 *Internet Penetration Rate (IPR)*

Menurut (IGI Global, n.d.) Tingkat penetrasi internet sesuai dengan presentase total penduduk suatu negara atau wilayah tertentu yang menggunakan internet.

$$IPR = \frac{\text{Jumlah Pengguna Internet}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

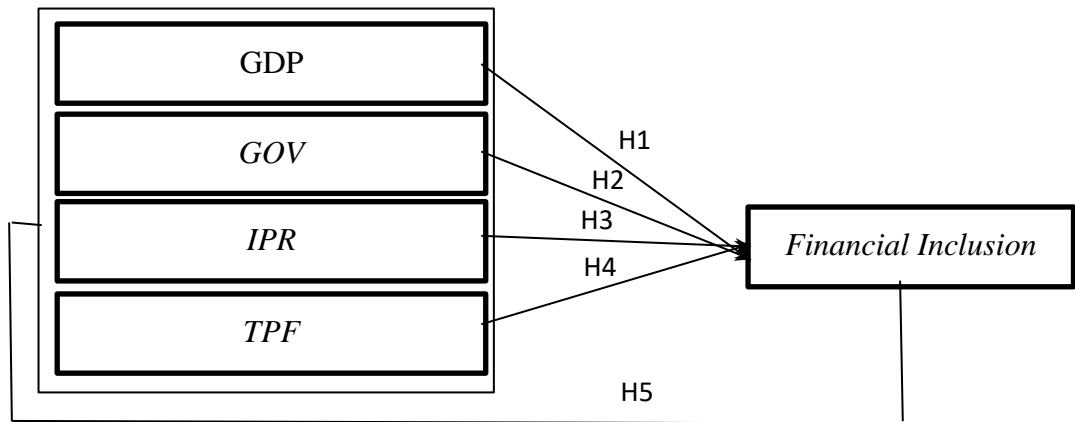
1.3.5 *Third Party Fund (TPF)*

Menurut (Dr. Kasmir, 2016) Dana pihak ketiga ialah bank mengumpulkan dana yang asalnya dari masyarakat luas, terbentuk dari Simpanan tabungan (*saving deposito*), simpanan giro (*demand deposito*), serta simpanan deposito (*time deposito*).

(Fahmi, 2014) Memaparkan bahwa DPK ialah nasabah ataupun masyarakat yang menyimpan dana dalam wujud tabungan, simpanan, serta deposito.

$$DPK = Giro + Deposito + Tabungan$$

1.4 Kerangka Konseptual



Gambar 1.2 Paradigma Penelitian

Sumber : Data diolah (2022)

1.5 Hipotesis Penelitian

Berlandaskan Pembahasan diatas kemudian diketahui hipotesis dari riset ini yakni:

H1 : GDP memiliki pengaruh terhadap *Financial Inclusion*

H2 : NPL memiliki pengaruh terhadap *Financial Inclusion*

H3 : GOV Memiliki pengaruh terhadap *Financial Inclusion*

H4 : IPR memiliki pengaruh terhadap *Financial Inclusion*

H5 : TPF Memiliki pengaruh terhadap *Financial Inclusion*

H6 : GDP, GOV, IPR, dan TPF memiliki pengaruh terhadap *Financial Inclusion*.